

ANALISIS TREND PERKEMBANGAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014-2018

Mufrida Zein¹⁾, Eni Suasri²⁾, Vivi Septia³⁾

¹⁾²⁾ Politeknik Negeri Tanah Laut
Jl. A. Yani KM. 6, desa Panggung Kab. Tanah laut, Kec. Pelaihari
¹⁾ Mufrida@politala.ac.id

Abstrak

Pendapatan pemerintah daerah terdiri dari beberapa sumber yaitu: dana pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penelitian ini menggunakan analisis trend dengan metode persentase untuk memperkirakan pendapatan daerah berdasarkan data pada tahun 2014-2018. Tujuan dari penelitian ini untuk menyajikan gambaran tentang perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut sehingga bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan proses transparansi. Perhitungan terhadap sumber- sumber pemasukan daerah membagikan hasil pemasukan pemerintah daerah kabupaten Tanah Laut dengan trend sangat rendah pada tahun 2015. Perihal ini disebabkan pada tahun 2015 hadapi defisit, akibat pemasukan yang diterima lebih rendah daripada belanja yang dicoba pemerintah. Pada tahun 2018 ialah Pemasukan Wilayah dengan trend sangat besar. Perihal ini disebabkan pada tahun 2018 hadapi surplus, diakibatkan pemasukan yang lebih besar dari belanja yang dicoba oleh pemerintah.

Kata kunci: Analisis trend, Metode Persentase, Pendapatan Pemerintah Daerah

Abstract

Regional government revenues consist of several sources, namely regional original revenue funds, balancing funds, and other legal regional income funds. This study uses trend analysis using the percentage method to estimate regional income based on data for 2014-2018. The purpose of this study is to present an overview of the development of regional income in Tanah Laut Regency therefore it can assist the government in realizing a transparent process. Calculations of regional income sources share the revenue of the Tanah Laut district government with a very low trend in 2015. This is due to a deficit in 2015 since the income received is lower than the government's spending. In 2018 there was a Regional Entry with a very large trend. This is since in 2018 there was a surplus, due to greater income than the government's spending.

Keywords: Trend analysis, Percentage Method, Local Government Revenue

1. PENDAHULUAN

Tanah Laut ialah salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah wilayah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun beberapa dokumen perencanaan pembangunan wilayah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan wilayah tersebut merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Wilayah(RPJMD) buat periode 5 tahun. RPJMD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018- 2023 lebih menekankan kepada pembangunan yakni pembinaan desa serta penyusunan kota.

Perencanaan Pembangunan yang dicoba pula mempengaruhi terhadap Anggaran Pemasukan serta Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Tanah Laut. Bersumber pada Peraturan Pemerintah No 12 Pasal 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD ialah bawah

untuk pemerintah Daerah buat melaksanakan penerimaan serta pengeluaran Daerah. Penerimaan serta pengeluaran Daerah yang telah dilaksanakan wajib dilaporkan selaku bentuk dari pertanggungjawaban. Bersumber pada Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pertanggungjawaban keuangan Daerah diwujudkan dalam wujud Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut ialah bentuk dari penguatan transparansi serta akuntabilitas. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran(LRA), Laporan Pergantian Saldo Anggaran Lebih(Laporan SAL), Neraca, Laporan Operasional(LO), Laporan Arus Kas(LAK), Laporan Pergantian Ekuitas(LPE) serta Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK). Laporan Pertanggungjawaban penerimaan serta pengeluaran wilayah tersebut tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran(LRA). LRA bagi Peraturan Pemerintah No 71 Lampiran 02 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sediakan data menimpa realisasi pemasukan, belanja, transfer, surplus/ defisit serta pembiayaan dari sesuatu entitas pelaporan yang tiap- tiap diperbandingkan dengan anggarannya(APBD)..

Pemasukan Daerah Bersumber pada PP Nomor 12 Pasal 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi seluruh penerimaan duit lewat Rekening Kas Universal Daerah yang tidak butuh dibayar kembali oleh Daerah serta penerimaan yang lain yang cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan diakui selaku penambah ekuitas yang ialah hak Daerah dalam 1(satu) tahun anggaran. Pemasukan Daerah terdiri atas 3 sumber ialah: 1) Pemasukan Asli Daerah (PAD), ialah pemasukan yang diperoleh Daerah yang dipungut bersumber pada peraturan Daerah cocok dengan peraturan perundang- undangan. PAD bertujuan membagikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah buat mendanai penerapan otonomi wilayah cocok dengan kemampuan wilayah selaku perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain- lain PAD yang legal. 2) Dana Perimbangan, ialah dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan kepada Daerah buat mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka penerapan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Universal(DAU), Dana Alokasi Spesial(DAK) serta Dana Untuk Hasil(DBH). 3) Lain- lain pemasukan Daerah yang legal ialah segala Pemasukan Daerah tidak hanya pemasukan asli wilayah serta dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, serta lain- lain pemasukan cocok dengan syarat peraturan perundang- undangan.

Pendapatan Daerah juga berpengaruh pada perkembangan ekonomi suatu daerah tertentu. Riset sebelumnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber pendapatan daerah yang memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Kusumawati & Wiksuana, 2018). Menurut (Nasir, 2019) kontribusi sumber PAD kabupaten/kota seluruh Indonesia tahun anggaran 2007-2013 didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari pajak yang dikategorikan memiliki kontribusi yang baik. Selanjutnya lain-lain PAD yang sah, retribusi dan BUMD. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Pendapatan Daerah juga menjadi tolak ukur kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian (Antari & Sedana, 2018) menunjukkan bahwa Pendapan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil analisis trend mengenai perkembangan Pendapatan Daerah pada penelitian ini menyajikan gambaran tentang perkembangan pendapatan daerah pada kurun waktu 2014-2018 secara akurat. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam pengawasan kinerja pemerintah, sebagai bentuk transparansi pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Laut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan hasil penelitian Vurry (2014), pada tahun Anggaran 2004-2013 rasio kemandirian keuangan termasuk dalam kategori rendah sekali, rasio efektivitas PAD sangat

efektif, rasio IKR sangat kurang, rasio efisiensi sangat efisien. Selanjutnya, dengan metode analisis trend rasio, diperoleh trend dengan arah perkembangan yang positif begitu pula dengan peramalannya di tahun 2014-2016.

Lebih lanjut, Wenur (2013) menunjukkan hasil riset yaitu bahwa kontribusi pajak dan retribusi terhadap Penerimaan Asli Daerah dari tahun 2007-2011 sebesar 68,18% - 78,22% setiap tahun mengalami kenaikan dengan pencapaian yang diperoleh bisa mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kontribusi PAD terhadap pembiayaan APBD Kota Bitung masih menyumbang angka dibawah 10% untuk persentasenya. Dengan hal ini menunjukkan bahwa keuangan Pemerintah Daerah Kota Bitung bisa untuk dikatakan mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Dengan menggunakan analisis trend rasio, pencapaian penerimaan PAD tahun 2013-2017 meningkat di setiap tahun. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan PAD guna peningkatan kemampuan Keuangan Daerah, yakni melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pajak dan Retribusi Daerah. Guna meningkatkan kemandirian pembiayaan keuangan daerah.

Aji (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa efektivitas sumber PAD Tahun Anggaran 2009-2013 berada pada kategori sangat efektif dengan rata-rata 112,48%. Sedangkan untuk kontribusi terbesar pada Tahun Anggaran 2009-2013 diperoleh dari lain-lain PAD yang sah sebesar 43,13%. Estimasi sumber PAD Tahun Anggaran 2014 menunjukkan seluruhnya mengalami peningkatan penerimaan dari tahun lalu kecuali retribusi daerah. Efektivitas penerimaan sumber PAD tahun 2014 memiliki kategori sangat efektif dengan rata-rata sebesar 110,89%. Terakhir kontribusi tertinggi tahun 2014 diperoleh dari lain-lain PAD yang sah sebesar 51,34%.

Menurut Harahap (2009), analisis trend adalah suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Hal ini membutuhkan berbagai macam informasi data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi (Permatasari, 2018). Sedangkan menurut (Octaviani et al., 2019) analisis trend dapat memprediksi perkembangan nilai yang berfluktuasi dari tahun-tahun sebelumnya.

Penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan analisis trend rasio keuangan untuk mengetahui trend pendapatan asli daerah. Pada penelitian ini dilakukan analisis trend dengan metode persentase, terhadap pendapatan pemerintah daerah, tidak hanya dari pendapatan asli daerah tapi juga dengan hasil dana perimbangan serta hasil lain-lain pendapatan daerah yang sah. Analisis trend persentase digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan perusahaan, apakah menunjukkan tendensi naik, tetap, atau menurun berdasarkan indeks pendapatan pada periode tertentu. Analisis trend persentase pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang perkembangan pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan pendapatan asli daerah, hasil dana perimbangan, dan hasil lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. METODE PENELITIAN

Data *time series* (deret waktu) adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut (Faishol et al., 2017) *time series* merupakan serangkaian data pengamatan yang terjadi berdasarkan indeks waktu secara berurutan dengan interval waktu tetap. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang menggunakan data pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan data lain-lain pendapatan daerah yang sah dari laporan pendapatan daerah Kab. Tanah Laut, melalui kepala bidang akuntansi dan pegawai sub bidang anggaran.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Trend dalam persentase. Metode persentase merupakan metode analisa untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan perusahaan, yaitu apakah menunjukkan tendensi naik, tetap atau menurun. Analisa ini

disebut juga dengan Analisa Naik Turun, karena dengan analisa tersebut dapat diketahui kenaikan atau penurunan dari Pendapatan Daerah. Berikut adalah rumus metode persentase:

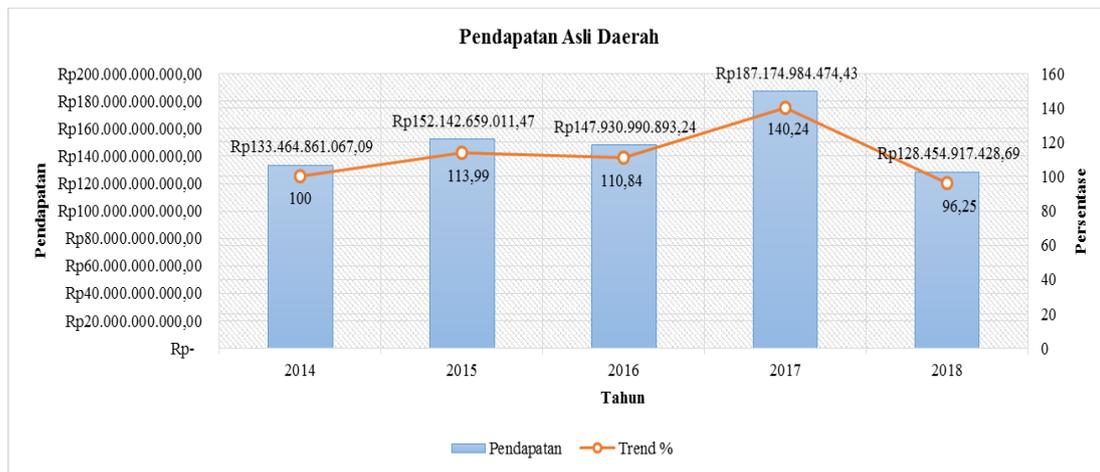
$$I_{t,0} = \frac{\sum P_t}{\sum P_0} \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan:

- $I_{t,0}$: Indeks pendapatan pada waktu t dengan periode dasar 0
- $\sum P_t$: Jumlah seluruh pendapatan pada periode t
- $\sum P_0$: Jumlah seluruh pendapatan pada periode dasar

4. PEMBAHASAN

Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari: a) Retribusi daerah, yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (UU No. 28 tahun 2009). b) Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009). c) Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (3) jasa giro; (4) pendapatan bunga; (5) tuntutan ganti rugi; (6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (7) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. d) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

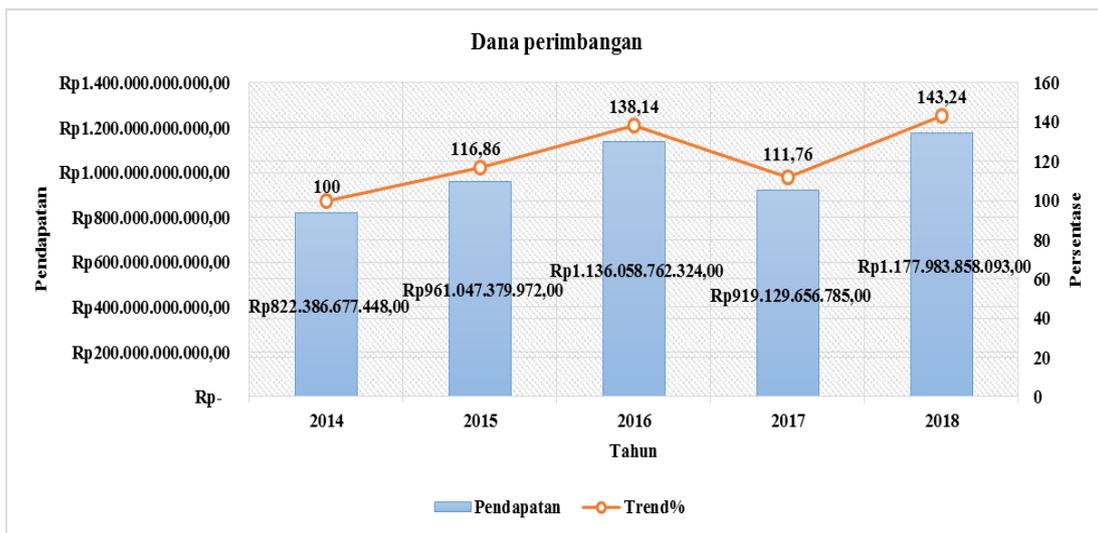


Gambar 1
Hasil Pendapatan Asli Daerah

Gambar 1 menunjukkan pada tahun 2018 PAD yang diterima sebesar Rp 128.454.917.428,69 dengan trend 96,25% yang berarti mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun dasar atau tahun 2014 sebesar 3,75%. Hal ini terjadi dipengaruhi oleh penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah pada tahun 2018 lebih rendah dari pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2017 PAD yang diterima sebesar Rp 187.174.984.474,43 dengan trend 140,24% yang berarti mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun dasar atau tahun 2014 sebesar 40,24%, kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi realisasi Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin meningkatkan persentase rasio kemandirian keuangan daerah dan sebaliknya

Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dapat mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan (Saleh, 2020).

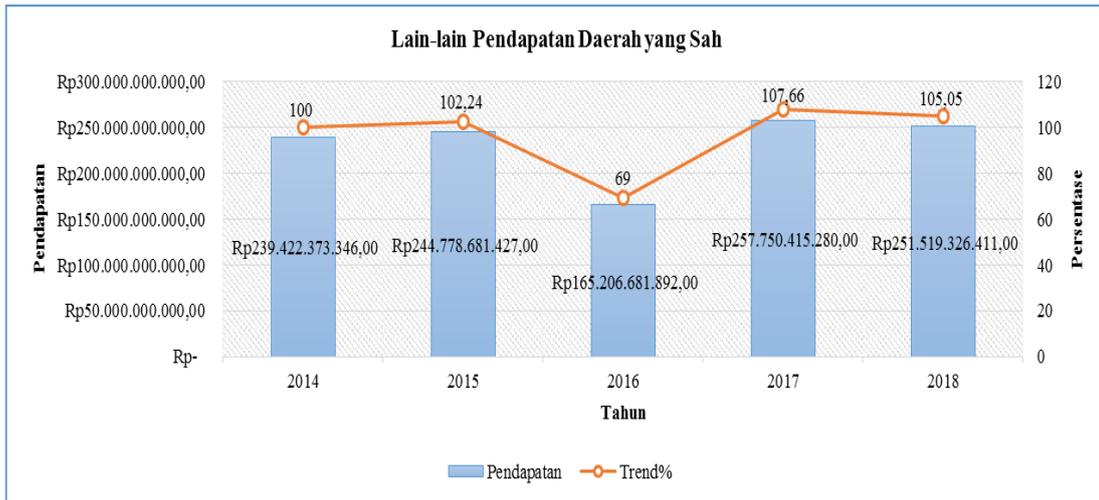
Selain PAD, tingkat kemandirian daerah juga dipengaruhi oleh Dana Perimbangan. Menurut (Andriana, 2020) Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang penting terhadap kemandirian daerah. Dana perimbangan terdiri dari: 1) Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang disalurkan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 2) Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 3) Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.



Gambar 2
Hasil Dana Perimbangan

Gambar 2 menunjukkan pada tahun 2017 Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah sebesar Rp 919.129.656.785 dengan trend 111,76% yang berarti mengalami kenaikan dibanding dengan tahun dasar atau tahun 2014 sebesar 11,76%. Sedangkan kenaikan tertinggi Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah adalah pada tahun 2018 sebesar Rp 1.177.983.858.093, dengan trend 143,24% yang berarti mengalami kenaikan dibanding dengan tahun dasar atau tahun 2014 sebesar 43,24%.

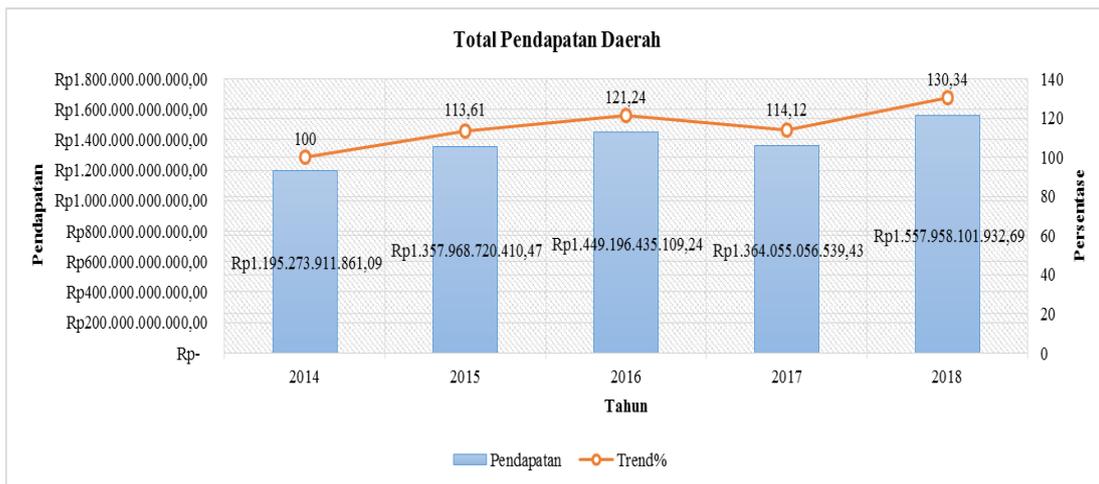
Sumber Pendapatan Daerah yang terakhir adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi: 1) Dana darurat, merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan yang mendesak akibat dari bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Hibah, merupakan bantuan berupa, barang, uang, dan/atau jasa yang berasal baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, ataupun masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggungjawab daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 3
Hasil Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Gambar 3 menunjukkan pada tahun 2016 Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah Daerah sebesar Rp 165.206.681.892 dengan trend 69,00% yang berarti mengalami penurunan dibanding dengan tahun dasar atau tahun 2014 sebesar 31,00%. Pada tahun 2017 Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp 257.750.415.280 dengan trend 107,66% yang berarti mengalami kenaikan dibanding dengan tahun dasar atau tahun 2014 sebesar 7,66%.

Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah maka hasil yang ditunjukkan untuk total Pendapatan Daerah dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4
Hasil Total Pendapatan Daerah

Pada tahun 2015 Pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.357.968.720.410,47 dengan trend 113,61% yang berarti mengalami kenaikan dibanding dengan tahun dasar atau tahun 2014 sebesar 13,61%. Pada tahun 2018 Pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.557.958.101.932,69 dengan trend 130,34% yang berarti mengalami kenaikan dibanding dengan tahun dasar atau tahun 2014 sebesar 30,34%. Pendapatan Daerah pada tahun 2015 mengalami defisit diakibatkan pendapatan yang diterima lebih rendah

daripada belanja yang dilakukan pemerintah, sedangkan pada tahun 2018 mengalami surplus karena pendapatan yang lebih tinggi dari belanja yang dilakukan oleh pemerintah.

Pendapatan Daerah pada tahun 2018 menjadi pendapatan dengan trend tertinggi, hal ini dipengaruhi oleh Dana Perimbangan yang diterima sangat tinggi. Sehingga PAD yang rendah dapat tertutupi dengan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mengalami kenaikan. Tahun 2015 menjadi tahun dengan trend pendapatan paling rendah, hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya kenaikan ataupun penurunan yang signifikan dibanding tahun-tahun yang lain.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan perhitungan hasil dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan Pendapatan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh tiga sumber yaitu, PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD paling rendah pada tahun 2018 dan paling tinggi terjadi pada tahun 2017. Dana perimbangan paling rendah terjadi pada tahun 2017 sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2018. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah paling rendah terjadi pada tahun 2016 sedangkan paling tinggi terjadi pada tahun 2017.

Perhitungan terkait sumber-sumber penerimaan atau Pendapatan Daerah tersebut mendapatkan hasil bahwa pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut paling rendah di tahun 2015. Hal tersebut karena pada tahun 2015 mengalami defisit, akibat pendapatan yang diterima lebih rendah daripada belanja yang dilakukan pemerintah. Tahun 2018 merupakan Pendapatan Daerah paling tinggi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 mengalami surplus, disebabkan pendapatan yang lebih tinggi dari belanja yang dilakukan oleh pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B. P., Kirya, I. K., & Susila, G. P. A. J. (2015). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2), 95–104.
- Andriana, N. (n.d.). *KEMANDIRIAN DAERAH*. 3.
- Antari, N., & Sedana, I. (2018). MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali-Indonesia Negara adalah wilayah yang ditempati masyarakat dan memiliki suatu organisasi yang berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan negara . *E-Jurnal Manajemen*, 7(2), 1080–1110. <https://doi.org/doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v7.i02.p19>
- Faishol, Y. M., Purnamasari, I., & Goejantoro, R. (2017). *Peramalan Regarima Pada Data Time Series (Studi Kasus : Penjualan Tiket Pesawat PT . Kumala Wisata Tenggara) Regarima Prediction Of Time Series Data (case study : Plane Ticket Sales PT . Kumala Wisata Tenggara)*. 8, 37–42.
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5), 2592. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i05.p12>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>

Biodata Penulis

Dr. Mufrida Zein, S.Ag., M.Pd



Dr. Mufrida Zein, S.Ag., M.Pd., lahir di Martapura, pada tanggal 17 Juni 1968, suami bernama Dr. Sihabuddin Chalid, M.M.Pd dan di karuniai 2 (dua) anak bernama Ir. Muhammad Khalil, S.T., M.T.; dan Ahmad Ziyad. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak H. Muhammad Irsyad Zein (alm) dan Hj. Mastuah. Jenjang pendidikan penulis adalah S1 Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 1992. Pendidikan Magister (S2) di S2 Manajemen Pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada tahun 2009; Pendidikan

Doktor (S3) Doctor dalam bidang ilmu Ekonomi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya di Surabaya pada tahun 2015. Pelatihan Kepemimpinan (Leadership) Pengelolaan Administrasi Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan, Alur Komunikasi pada SOTK (2017). Workshop Kepemimpinan bagi pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (2017). Workshop Kepemimpinan bagi pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (2018). Pelatihan Teknisi Akuntansi (2018). Bimbingan Teknis Pengangkatan Jabatan Akademik/ Fungsional Dosen (2019). Keanggotaan dalam Organisasi Asosiasi Dosen Indonesia.

Pengalaman jabatan akademik yaitu Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Tanah Laut (2014 - 2016). Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut (2017 - Sekarang); Pansel Jabatan Tinggi Pratama Pemkab Tanah Laut (2019); Pansel Jabatan Tinggi Pratama Pemkab Tanah Laut (2021); Kerjasama Penelitian: Anggota Tim Peneliti analisis kelayakan aplikasi pembelajaran *vocabulary* berbasis mobile (M-learning) untuk usia dini (studi kasus pada paud); Ketua Tim Peneliti *indonesian coffee trade: e commerce and supply chain management*; Anggota Tim Peneliti pengembangan digital marketing minimarket syariah insan nurul muhibbin menggunakan whatsapp business.



Eni Suasri, lahir di Benua Tengah, 10 Maret 1977. Menempuh pendidikan S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin dan lulus tahun 2004 kemudian melanjutkan S2 Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 penulis berprofesi sebagai staff keuangan di Politeknik Negeri Tanah Laut. Dan sejak tahun 2018 sampai sekarang penulis kemudian menjadi dosen tetap di Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut.



Vivi Septia, lahir di Tanah Laut, 07 September 1999, menempuh pendidikan D-III Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut dan lulus tahun 2020, kemudian bekerja sebagai staf keuangan pada bBadan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut